



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

[www.mkri.id](http://www.mkri.id)

---

**LAPORAN HASIL MONITORING  
TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN APIP  
SAMPAI DENGAN SEMESTER II TA 2024  
DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT  
JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI**

Nomor : 11771/2900/PW.02/12/2024  
Tanggal : 31 Desember 2024



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	<b>ii</b>
<b>RESUME HASIL PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT</b>	<b>iii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Dasar Hukum Pemantauan	1
B. Unit Kerja Pemantauan	1
C. Tujuan Pemantauan	2
D. Sasaran Pemantauan	2
E. Metode Pemantauan	2
F. Jangka Waktu Pemantauan	2
<b>II. HASIL PEMANTAUAN</b>	<b>3</b>
A. Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP melalui Audit Operasional sampai dengan Semester II TA 2024	3
B. Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP melalui Audit Kinerja sampai dengan Semester II TA 2024	3
C. Saldo Akhir atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP melalui Audit Operasional dan Audit Kinerja Unit Kerja sampai dengan Semester II TA 2024	4
<b>III. SARAN</b>	<b>5</b>
<b>IV. PENUTUP DAN APRESIASI</b>	<b>5</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1.1.** Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP atas Laporan Hasil Audit Biro Umum TA 2018
- Lampiran 1.2.** Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP atas Laporan Hasil Audit Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi TA 2021  
Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP atas Laporan Hasil Audit Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi TA 2022
- Lampiran 1.3.** Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP atas Laporan Hasil Audit Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan TA 2022
- Lampiran 2.1.** Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP atas Laporan Hasil Audit Kinerja Kepaniteraan TA 2018
- Lampiran 2.2.** Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP atas Laporan Hasil Audit Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi TA 2019



**Laporan Hasil Monitoring atas  
Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP  
Sampai Dengan Semester II Tahun 2024  
di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal  
Mahkamah Konstitusi**

**RESUME HASIL PEMANTAUAN ATAS TINDAK LANJUT**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP Mahkamah Konstitusi telah memantau tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pelaksanaan tindaklanjut menjadi tanggungjawab unit kerja yang diberikan tugas dalam mengelola keuangan negara.

Pemantauan atas tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dilakukan untuk menilai sejauh mana unit kerja menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan kendala unit kerja dalam melaksanakan rekomendasi APIP. Sasaran pemantauan atas tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP adalah ketepatan/ kesesuaian unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP.

APIP memantau tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Audit Operasional dan Audit Kinerja sampai dengan Semester II Tahun 2024 pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan status sebagai berikut:

1. Rekomendasi yang sudah selesai ditindaklanjuti sebanyak 19 rekomendasi atas Audit Operasional dan sebanyak 26 rekomendasi atas Audit Kinerja;
2. Rekomendasi yang masih dalam proses (belum selesai selesai ditindaklanjuti) sebanyak 10 rekomendasi atas Audit Operasional dan sebanyak 2 rekomendasi atas Audit Kinerja;
3. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi atas Audit Operasional dan sebanyak 0 rekomendasi atas Audit Kinerja;
4. Tidak ada rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti.

Inspektur,  
**Sigit Purnomo**



## **I. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Surat Tugas dari Inspektur Nomor 219/2900/12/2024 tanggal 19 Desember 2024, APIP Mahkamah Konstitusi telah melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP sampai dengan Semester II Tahun Anggaran 2024 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan uraian sebagai berikut:

### **A. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.2 Tahun 2018 tentang Pedoman Audit Kinerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
11. Standar Audit Intern Pemerintah, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

### **B. Unit Kerja Pemantauan**

1. Biro Perencanaan dan Keuangan MK;
2. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi MK;
3. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan MK;



4. Biro Humas dan Protokol MK;
5. Biro Umum MK;
6. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan MK;
7. Pusat Teknologi, Informasi dan Komunikasi MK;
8. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK;
9. Kepaniteraan MK.

### **C. Tujuan**

Pemantauan atau monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP sampai dengan Semester II Tahun 2024 dilakukan untuk mengetahui:

1. Ketepatan atau kesesuaian dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan APIP;
2. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan APIP yang telah ditindaklanjuti;
3. Kendala atau alasan unit kerja tidak dapat melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan APIP.

### **D. Sasaran**

Sasaran pemantauan tindaklanjut hasil pemeriksaan adalah:

1. Tindaklanjut yang telah dilaksanakan oleh unit kerja posisi per Desember 2024 (Semester II) atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP berupa Laporan Hasil Audit Operasional/ Kepatuhan s.d. Semester II Tahun 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti;
2. Tindaklanjut yang telah dilaksanakan oleh unit kerja posisi per Desember 2024 (Semester II) atas rekomendasi hasil pemeriksaan APIP berupa Laporan Hasil Audit Kinerja s.d. Semester II Tahun 2024 yang belum selesai ditindaklanjuti;

### **E. Metode Pemantauan**

Pemantauan dilakukan dengan menginventarisasi dan menelaah tindaklanjut yang telah dilakukan MK serta melakukan konfirmasi perkembangan penyelesaiannya.

### **F. Jangka Waktu Pemantauan**

Pemantauan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja mulai tanggal 19 s.d 31 Desember 2024, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor 219/2900/12/2024 tanggal 19 Desember 2024.



## II. HASIL PEMANTAUAN

### A. Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP melalui Audit Operasional sampai dengan Semester II TA 2024

Dari hasil pemantauan APIP atas tindaklanjut rekomendasi Laporan Hasil Audit Operasional yang belum ditindaklanjuti sampai dengan Semester II TA 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. **Audit Operasional Biro Umum TA 2018** yang telah mengungkapkan 8 temuan dengan 10 permasalahan dan 11 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 6 rekomendasi dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 5 rekomendasi senilai Rp 98.870.843,- rincian sebagaimana **Lampiran 1.1**;
2. **Audit Operasional Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi TA 2021** yang telah mengungkapkan 4 temuan dengan 8 permasalahan dan 9 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 7 rekomendasi senilai Rp 17.549.000,- dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi senilai Rp 0,- rincian sebagaimana **Lampiran 1.2**;
3. **Audit Operasional Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi TA 2022** yang telah mengungkapkan 3 temuan dengan 3 permasalahan dan 5 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 4 rekomendasi senilai Rp 0,- dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 1 rekomendasi senilai Rp 0,- rincian sebagaimana **Lampiran 1.2**;
4. **Audit Operasional Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan TA 2022** yang telah mengungkapkan 1 temuan dengan 1 permasalahan dan 4 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi senilai Rp 5.655.148,- dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi senilai Rp 0,- rincian sebagaimana **Lampiran 1.3**.

### B. Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP melalui Audit Kinerja sampai dengan Semester II TA 2024

Dari hasil pemantauan APIP atas tindaklanjut rekomendasi Laporan Hasil Audit Kinerja yang belum ditindaklanjuti sampai dengan Semester II TA 2024 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. **Audit Kinerja Kepaniteraan TA 2018** yang telah mengungkapkan 8 temuan dengan 8 permasalahan dan 16 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 14 rekomendasi dan belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 2 rekomendasi rincian sebagaimana **Lampiran 2.1**;



2. **Audit Kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi TA 2019** yang telah mengungkapkan 7 temuan dengan 7 permasalahan dan 12 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 12 rekomendasi, belum selesai ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi, dan belum ditindaklanjuti sebanyak 0 rekomendasi rincian sebagaimana **Lampiran 2.2**.

**C. Saldo Akhir atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan melalui Audit Operasional dan Audit Kinerja Unit Kerja sampai dengan Semester II Tahun 2024**

APIP dalam hal ini APIP MK telah melaksanakan pemantauan tindaklanjut atas rekomendasi Audit Operasional dan Audit Kinerja sampai dengan Semester II Tahun 2024 pada unit kerja di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Adapun saldo akhir perkembangan penyelesaian rekomendasi sampai dengan Semester II TA 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

**Saldo Akhir TLHP APIP Audit Operasional  
Sampai dengan Semester II TA 2024**

Tahun	Unit Kerja	Total Rekomendasi	Status Tindaklanjut Rekomendasi			
			Selesai	Belum Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
2018	Biro Umum	11	6	5	0	0
2021	Biro SDMO	9	7	2	0	0
2022	Biro SDMO	5	4	1	0	0
2022	Biro HAK	4	2	2	0	0
	<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Saldo Akhir TLHP APIP Audit Kinerja  
Sampai dengan Semester II TA 2024**

Tahun	Unit Kerja	Total Rekomendasi	Status Tindaklanjut Rekomendasi			
			Selesai	Belum Selesai	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti
2018	Kepaniteraan	16	14	2	0	0
2019	Biro SDMO	12	12	0	0	0
	<b>Total</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### III. SARAN

Berdasarkan hasil pemantauan, permasalahan yang umum dialami oleh unit kerja dalam menyelesaikan tindaklanjut rekomendasi adalah kesibukan dalam mengerjakan tugas pokok dan fungsi masing-masing, serta adanya kesulitan dalam berkoordinasi/berkomunikasi dengan pihak ketiga yang tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya.

Dalam hal pihak ketiga yang belum menyelesaikan kewajiban berupa setor ke kas negara, unit kerja terkait dapat menerbitkan Surat Penagihan secara berkelanjutan (tahap periodik) sampai dengan Surat Penagihan Akhir untuk dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### IV. PENUTUP DAN APRESIASI

Demikian hasil monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP sampai dengan Semester II Tahun 2024 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Kami mengapresiasi kepada seluruh unit kerja yang telah mendukung dalam penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan APIP ini. Dalam hal percepatan penyelesaian tindak lanjut, unit kerja terkait dapat berkonsultasi dengan APIP.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,  
**Sigit Purnomo**

